

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA**

Jl. ANDI MALLOMBASANG NO.46 SUNGGUMINASA





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disiapkan beberapa program/kegiatan, baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya menggambarkan visi misi dari pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Kabupaten.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparaturnya di masa mendatang.

Sungguminasa, Januari 2023  
**Kepala Dinas**



**H. Syamhari Rasyid, S.Ag. MH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19770917 200312 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa - Gowa

---



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika .....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	11
2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD .....	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	45
3.3. Program dan Kegiatan .....	
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah .....	
BAB V. PENUTUP .....	50
LAMPIRAN Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 .....	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke Empat dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 000.7.2.5/020/DKP tentang SK Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024.

#### **1.1 Latar Belakang**

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026. Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari tahap persiapan, penyusunan rancangan Renja, penyusunan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja. Dalam tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap penyusunan rancangan Renja, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra, perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2025, perumusan Tujuan, Sasaran, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RKPD. Dalam tahap penyusunan rancangan



akhir, Renja mengalami penyempurnaan setelah dilakukan verifikasi rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD melalui Forum Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah. Selanjutnya dilakukan penajaman keselarasan berbagai dokumen acuan penyusunan Renja melalui pembahasan intern masing – masing Perangkat Daerah. Setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap rancangan akhir Renja, barulah dilakukan penetapan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. Sebagai dokumen rencana tahunan, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang digambarkan sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran serta Program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan untuk memasukkan program / kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program / kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2025.
3. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja)

## **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.





2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;



14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Gerakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
18. Peraturan Bupati Gowa Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Dinas Ketahanan pangan :

Maksud dari penyusunan Renja “Dinas Ketahanan Pangan ” tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 dan Renstra sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan :

Tujuan penyusunan Renja “Dinas Ketahanan Pangan “ Tahun 2025” adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan “Dinas Ketahanan Pangan ” untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024.



**BAB I. PENDAHULUAN** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- I.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- I.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- I.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- I.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. .

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan



nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V. PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana tindak lanjut

Lampiran :

- Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024;
- Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa;
- Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2025;
- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026





## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yg seharusnya sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : **Tabel T-C.29**
7. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Tabel T-C.29.  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
 Kabupaten Gowa

Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+)	11=(10/4)
1		Urusan Pangan								
1	0 1	Bidang Urusan Pangan								
		Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan dan Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi dan Kestabilan Harga Pangan serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan								
		Sasaran : Menungkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan								
2	0 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	200 %	200%



1	0	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
1	0	0	0	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4		4	4	100 %	4	800%	200%
1	0	0	0	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1		1	1	100%	1	200 %	200%
1	0	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%





				<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	30		28	28	100%	28	5600%	187%
				<i>Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	30		28	28	100%	28	5600	187%
				<i>Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian</i>	95%		91%	91%	100%	92%	183%	193%
				<i>Pengadaan pakaian beserta atribut kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	40		28	28	100%	30	5800%	145,0%
				<i>Administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan</i>	89%		86%	86%	100%	87%	173%	2%



				administrasi umum perangkat daerah								
				<i>Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	15	15	100%	20	3500%	175%
				<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	30	30	30	100%	30	6000%	200%
				<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	2	2	2	100%	2	400%	200%
				<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2	2	100%	2	400%	200%
				<i>Fasilitas kunjungan tamu</i>	<i>Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu</i>	120	120	120	100%	120	24000%	200%
				<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	450	450	450	100%	450	90000%	200%
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan/pemeli	89%	86%	86%	100%	87%	173%	194%



					haraan barang milik daerah							
				Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2	2	2	100%	2	400%	200%
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	3	3	100%	4	700%	140%
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau dan bangunan lainnya	Jumlah unit peralatan dan sarana dan prasarana Gedung kantor	15	3	3	100%	15	180%	120%
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	90%	86%	86%	100%	87%	173%	263%
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	750	750	750	100%	760	151000%	201%
				Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya, air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	3	3	100%	3	600%	200%
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	15	15	15	100%	15	3000%	200%



					<i>kantor yang disediakan</i>									
					<i>Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>									
				<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>		15		15	15	100%	15	3000%	200%	
				<b>Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>90%</b>		<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>175%</b>	<b>194%</b>	
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya</i>	2		2	2	100%	2	400%	200%	
				<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas oprasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	3		3	3	100%	3	600%	200%	
				<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	5		5	5	100%	5	1000%	200%	
				<i>Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	9		9	9	100%	9	1200%	133%	



				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN (TERSEDIANYA CADANGAN PANGAN BERAS DAN JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN)	82%		79%	79%	100%	80%	159%	194%
				Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur yang direalisasikan	85%		79%	79%	100%	80%	159%	187%
				<i>Penyediaan infrastruktur lumbung pangan</i>	<i>Jumlah lumbung pangan yang tersedia</i>	4		4	4	100%	4	800%	200%
				<i>Penyediaan infrastruktur lantai jemur</i>	<i>Jumlah lantai jemur yang tersedia</i>	4		4	4	100%	4	800%	200%
				<i>Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya</i>	<i>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan</i>	4		4	4	100%	4	800%	200%
				<i>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH PRODUK PANGAN YANG DI KONSUMSI MASYARAKAT	14%		14%	14%	100%	14%	28%	200%



				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	PRODUK PANGAN ALTERNATIF Persentase stok pasokan dan harga pangan sesuai kebutuhan kabupaten	81%		81%	81%	100%	82%	163%	192%
				<i>Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan</i>	<i>Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan</i>	2		2	2	100%	2	200%	200%
				<i>Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal</i>	<i>Pangan berbasis sumber daya local yang tersedia</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya</i>	<i>Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Pemanfaatan stok, pasokan dan harga pangan</i>	<i>Pemantauan stock, Pasokan dan harga pangan</i>	3		3	3	100%	3	200%	200%
				<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan</i>	<i>Jumlah kelembagaan dan jaringan dan distribusi pangan yang di kembangkan</i>	10		7	7	100%	10	1700%	170%
				<i>Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia</i>	<i>Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani</i>	20		20	20	100%	20	400%	200%



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa - Gowa

					<i>Indonesia yang dikembangkan</i>								
				Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa	Persentase stok cadangan pangan	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
				<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/kota</i>	3		3	3	100%	3	600%	600%
				<i>Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah cadangan panga [emerintah kabupaten/kota</i>	50		20	20	100%	30	5000%	100%
				<i>Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara</i>	50		20	20	100%	30	5000%	100%
				Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	Persentase komoditas pangan local yang ditetapkan harganya	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
				<i>Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				Pelaksanaan Pencapaian Trget Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	Persentase jumlah dokumen angka ketersediaan Energi (Kilo Kalori Perkapita/Tahun)	90%		86%	86%	100%	87%	173%	192%



				<i>Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun</i>	<i>Target konsumsi pangan Perkapita/Tahun</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<i>Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal</i>	<i>Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal</i>	2		2	2	100%	2	400%	200%
				<i>Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita/Tahun</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita/Tahun</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>JUMLAH DESA/KELURAHAN RAWAN PANGAN/JUMLAH DESA DAN KELURAHAN</b>	40%		46%	46%	100%	44%	90%	225%
				<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Persentase Penanganan Kerawanan Pangan</b>	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
				<i>Penyusunan pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan pangan yang dimuktahirkan</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%
				<b>Penanganan Kerawanan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penanganan</b>	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%





					Kerawanan Pangan Yang dilakukan								
					<i>Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilakukan</i>	1	1	1	100%	1	200%	200%
					<i>Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</i>	1	1	1	100%	1	200%	200%
					<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>SAMPEL PANGAN YANG AMAN/JUMLAH TOTAL SAMPEL PANGAN</b>	83%	82%	82%	100%	82%	164%	198%
					<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kecamatan yang menjadi Target Pengawasan dalam Setahun</b>	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
					<i>Penguatan kelembagaan Keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/Kota yang di bina</i>	2	2	2	100%	2	400%	200%



				<i>Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	3		3	3	100%	3	600%	200%
				<i>Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah resgistrasi keamanan Pangan segar asala tumbuhan Daerah kabupaten/kota</i>	5		5	5	100%	5	1400%	280%
				<i>Rekomendasi keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah rekomendasi Keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	2		2	2	100% <sup>1</sup>	2	400%	200%
				<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian MUtu Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	1		1	1	100%	1	200%	200%



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format **Tabel T-C.30**.



**Tabel : T-C.30.**  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Indikator Kinerja Tujuan :</b> - Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah serta terjaminnya Keamanan yang dikonsumsi masyarakat - Meningkatnya Stok Cadangan Pangan Pemerintah (100 Ton) dan masyarakat serta terjaminnya Keamanan Pangan masyarakat		Ketersediaan pangan Utama (Beras)	174.886 Ton	175.886 Ton	176.886 Ton	178.886 Ton	251.701 Ton	251.701 Ton	-	-	Terlaksananya koordinasi dan analisis data Kepada SKPD Penyedia data Dinas Tanaman pangan dan Horti kultura
2	<b>Indikator Kinerja Sasaran :</b> Meningkatnya Pemenuhan Pola Pangan Harapan bagi Masyarakat dan Ketersediaan Cadangan Pangan		Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	217.500 Ton	249.830 Ton	287.300 Ton	295.200 Ton	368.798 Ton	368.798 Ton	-	-	Terlaksananya koordinasi dan analisis data Kepada SKPD Penyedia data Dinas Tanaman pangan dan Horti kultura
3			Mutu konsumsi Pangan Sesuai Pola Pangan harapan (PPH)	90.1 Skor	90.2 Skor	90.3 skor	90.4 skor	90.1 Skor	90.2 Skor	-	-	Terlaksananya analisis penetapan target konsumsi pada Mutu Konsumsi sesuai Pola Pangan



Harapan (PPH) Sumber data dari Ibu Rumah Tangga pada 9 Kecamatan dan 270 Responden
--



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Isu – isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritik yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan Ketahanan Pangan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah:
  1. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas dan cadangan pangan masyarakat belum berkembang termasuk belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
  2. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan akses pangan masih rendah.
  3. Ketergantungan konsumsi beras dan kecenderungan konsumsi terigu masih cukup tinggi, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
  4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk, karena pengetahuan budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
  5. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal yang mendukung penganekaragaman konsumsi pangan
  6. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras yang masih tinggi;



7. Perubahan iklim global tidak dapat dihindari dan dapat mempengaruhi produksi, distribusi, cadangan dan harga pangan.
8. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar meskipun telah menunjukkan trend yang menurun. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Proses dalam mengikhtikarkan ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gowa, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Permasalahan pokok ketahanan pangan yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi antara lain :

1. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah.
2. Masih rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Masih rendahnya prevalensi ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk Kabupaten Gowa.
4. Belum tercukupinya ketersediaan pangan untuk masyarakat Kabupaten Gowa.
5. Masih rendahnya daya dukung Ketahanan Pangan.

Dalam menjalankan Tupoksinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Kurangnya ketersediaan data rumah tangga penerima bantuan cadangan Pangan
2. Belum optimalnya mekanisme distribusi pangan;
3. Belum optimalnya penanganan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal
5. Belum stabilnya pasokan pangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
7. Belum Optimalnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat



Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintah terbaik”. Dalam rangka pencapaian visi dimaksud di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Gowa berikut dengan penjelasan yang terkandung didalamnya serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik;
4. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkelanjutan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa dimaksud, DKP sesuai Tupoksi nya yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;





- b. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman, dan kelembagaan dan keamanan pangan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan kelembagaan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan kelembagaan dan keamanan pangan

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas dinas ketahanan pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 2 yaitu “ *Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi*”. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam menjalankan Tupoksi nya pada bidang urusan Pangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja. Tantangan yang paling nyata dihadapi terkait dengan pembinaan ketahanan pangan adalah makin merambatnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian, perikanan dan lahan hutan rakyat, baik sektor perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat, maupun sektor industri barang serta jasa perdagangan dan wisata untuk mengembangkan skala usaha dalam pemenuhan



target produksi dan jasanya, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Peningkatan Ketahanan Pangan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah:

1. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas dan cadangan pangan masyarakat belum berkembang termasuk belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
2. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan akses pangan masih rendah.
3. Ketergantungan konsumsi beras dan kecenderungan konsumsi terigu masih cukup tinggi, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk, karena pengetahuan budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. (B2SA)
5. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal yang mendukung penganekaragaman konsumsi pangan
6. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras yang masih Tinggi.
7. Perubahan iklim global tidak dapat dihindari dan dapat mempengaruhi produksi, Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan
8. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.
9. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan segar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten Gowa Perlu dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.



Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten Gowa antara lain :

1. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras, sementara umbi-umbian dan sumber karbohidrat yang lain hanya dijadikan sebagai makanan tambahan.
  2. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan masyarakat/kelompok wanita dalam mengangkat citra pangan lokal untuk memiliki potensi tawaran (nilai jual).
  3. Tidak adanya Regulasi di tingkat daerah/kabupaten yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan ketahanan pangan khusus pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga secara menyeluruh dan kontinyu di Tk. Desa/Kelurahan.
  4. Tidak adanya regulasi di Tk. Kabupaten yang memberi kewenangan kepada Dinas Ketahanan Pangan beserta SKPD terkait, dalam melakukan tindakan/sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian bahan tambahan makanan yang berlebihan/tdk direkomendit.
  5. Masih terdapatnya sejumlah rumah tangga yang terindikasi rawan pangan pada desa/kelurahan tertentu yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
  6. Adanya kecenderungan masyarakat makan makanan cepat saji.
  7. Tidak adanya penyuluh/pendamping khusus ketahanan pangan dalam menjalankan setiap program untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.
  8. Masih adanya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat.
- Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan kabupaten Gowa adalah :

1. Kabupaten Gowa wilayah yang terdekat dengan makassar / ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bisa menjadi daerah penyanggah kebutuhan pangan bagi kota makassar.
2. Iklim sangat mendukung dilakukannya penanaman Indeks Pertanaman (IP) tiga kali (3x)
3. Terjadi sinergitas program lintas sektor memberi peluang yang luas untuk dilaksanakan kegiatan secara terpadu
4. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi wilayah di bidang pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan.



5. Peran pemerintah yang konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan pemasaran dan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Peluang dari lingkungan eksternal yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Gowa antara lain :

1. Sasaran pertama dari program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Ketersediaan Pangan utama bagi masyarakat melalui Distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mengembangkan Kelembagaan jaringan distribusi pangan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Serta terkelolanya cadangan pangan untuk mengatasi situasi krisis, seperti bencana alam, gangguan iklim dan juga dapat membantu serta menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan di pasar.
2. Sasaran kedua dari program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun di Kabupaten Gowa tahun 2025 yaitu Tertanganinya Daerah/Wilayah yang rentan terkena rawan pangan melalui Indikator Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih, Indikator Rasio jumlah sarana dan prasarana penyediaan pangan terhadap total jumlah rumah tangga, Indikator Jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, Indikator jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk.
3. Sasaran ketiga dari program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Diversifikasi Pola Pangan Harapan Masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini sangat menunjang dan mengupayakan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dengan pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber-pangan kebutuhan keluarga dalam meningkatkan skor pola pangan harapan (skor PPH) Kabupaten Gowa.



4. Sasaran keempat dari program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Mutu Keamanan Pangan Segar melalui pengawasan Keamanan pangan segar. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar yang berfungsi sebagai penyaluran pengetahuan kepada pelaku usaha tentang praktik dan implementasi keamanan yang baik, dan pengujian keamanan pangan segar sangat membantu dan menjaga kualitas produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas Konsumsi pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

**Adapun** faktor penyebab belum berkembangnya Konsumsi pangan yang beranekaragaman, yaitu :

1. Belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
2. Belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,



3. Belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
4. Rendahnya citra pangan lokal,
5. Belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective. Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet dll ) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak dapat di rancangan awal RKPD, atau pogram dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
4. Lampirkan table T-C 31



Tabel T-C 31  
 Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2025  
 Pemerintah Kabupaten Gowa

Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<i>berdasarkan rincian belanja</i>					<i>berdasarkan rincian belanja</i>	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	872.407.372	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	872.407.372	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kerja	100%	77.272.575	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kerja	100%	77.272.575	



			<i>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>36.060.535</i>			<i>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>36.060.535</i>	
	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD</i>	<i>1 laporan</i>	<i>25.757.525</i>			<i>Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD</i>	<i>1 laporan</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>25.757.525</i>			<i>Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Disketapang</i>				





Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi keuangan		100%	188.029.933	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi keuangan		100%	188.029.933
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>30 Orang/Bulan</i>	<i>2.867.410.993</i>				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>30 Orang/Bulan</i>	<i>2.867.410.993</i>
	<i>Penyediaan Gadi dan Tunjangan ASN</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyediaan Gadi dan Tunjangan ASN</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>30 Orang</i>	<i>2.867.410.993</i>				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>30 Orang</i>	<i>2.867.410.993</i>
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Disketapang</i>				



			<i>Jumlah Dokumen Penata usaha dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>154.545.150</i>	<i>Pelaksanaan Penata Usahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Dokumen Penata usaha dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>154.545.150</i>	
	<i>Pelaksanaan Penata Usahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Disketapang</i>									
			<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahunSKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25.757.525</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahunSKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Disketapang</i>									
			<i>Persentase ketersediaan Layanan Administrasi kepegawaian</i>	<i>93%</i>	<i>27.045.401</i>	<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan Layanan Administrasi kepegawaian</i>	<i>93%</i>	<i>27.045.401</i>	
	<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>										



	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	<i>20 Paket</i>	<i>15.454.515</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	<i>20 Paket</i>	<i>15.454.515</i>	
	<i>Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkap an Kantor yang disediakan</i>	<i>30 Paket</i>	<i>25.757.525</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkap an Kantor yang disediakan</i>	<i>30 Paket</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Barang cetakan dan pengganda an yang disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>7.650.750</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Barang cetakan dan pengganda an yang disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>7.650.750</i>	



			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.606.054</i>			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.606.054</i>	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu</i>	<i>120 Laporan</i>	<i>7.727.258</i>			<i>Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu</i>	<i>120 Laporan</i>	<i>7.727.258</i>	
	<i>Fasilitas Kunjungan tamu</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Fasilitas Kunjungan tamu</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>450 laporan</i>	<i>257.575.250</i>			<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>450 laporan</i>	<i>257.575.250</i>	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Persentase Pengadaan /Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>89%</i>	<i>133.939.130</i>			<i>Persentase Pengadaan /Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>89%</i>	<i>133.939.130</i>	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					



			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Yang Disediakan</i>	<i>2 Unit</i>	<i>108.181.605</i>			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Yang Disediakan</i>	<i>2 Unit</i>	<i>108.181.605</i>	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>	<i>4 Unit</i>	<i>25.757.525</i>			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>	<i>4 Unit</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Disketapang</i>				
			<i>Jumlah Unit Peralatan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia</i>	<i>15 Unit</i>	<i>30.015.100</i>			<i>Jumlah Unit Peralatan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia</i>	<i>15 Unit</i>	<i>30.015.100</i>	
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>				



	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	38.121.137	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	38.121.137	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disketapang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	750 Laporan	12.363.612	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disketapang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	750 Laporan	12.363.612	
	Penyediaan Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Disketapang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	10.201.000	Penyediaan Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Disketapang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	10.201.000	



			<i>Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	<i>15 Laporan</i>	<i>15.454.515</i>						
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	<i>15 Laporan</i>	<i>15.454.515</i>	
			<i>Jumlah laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umim Kantor yang disediakan</i>	<i>15 laporan</i>	<i>7.727.258</i>						
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umim Kantor yang disediakan</i>	<i>15 laporan</i>	<i>7.727.258</i>	
			<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>89%</i>	<i>61.818.060</i>						
	<i>Penyediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					<i>Penyediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>89%</i>	<i>61.818.060</i>	



			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya</i>					<i>Jumlah Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya</i>			
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Disketapang</i>		<i>2 Unit</i>	<i>7.500.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Disketapang</i>		<i>2 Unit</i>	<i>7.500.000</i>	
	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah kendaraan Perorangan Dinasatau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya</i>	<i>3 Unit</i>	<i>12.500.000</i>	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah kendaraan Perorangan Dinasatau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya</i>	<i>3 Unit</i>	<i>12.500.000</i>	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>5 Unit</i>	<i>10.303.010</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>5 Unit</i>	<i>10.303.010</i>	





	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	36.060.535	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	36.060.535	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Disketapang	Persentase Ketersediaan dan Diatribusi Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	81%	608.242.963	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Ketersediaan dan Diatribusi Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	81%	608.242.963	
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung kemandirian Pangan dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Disketapang	Persentase Infrastruktur yang direalisasikan	82 %	608.242.963	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung kemandirian Pangan dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Persentase Infrastruktur yang direalisasikan	82 %	608.242.963	



	<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia</i>	<i>4 Unit</i>	<i>63.358.715</i>	<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Persentase Infrastruktur yang direalisasikan</i>	<i>4 Unit</i>	<i>63.358.715</i>	
	<i>Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Lantai jemur yang tersedia</i>	<i>4 Unit</i>	<i>63.385.715</i>	<i>Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Lantai jemur yang tersedia</i>	<i>4 Unit</i>	<i>63.385.715</i>	
	<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia</i>	<i>4 Unit</i>	<i>196.690.860</i>	<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia</i>	<i>4 Unit</i>	<i>196.690.860</i>	
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan infrastruktur Logistik</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>58.602.577S</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan infrastruktur Logistik</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>58.602.577S</i>	



			Jumlah Produk Pangan yang Dikonsumsi Masyarakat Produk pangan Alternatif	14%	540.200.096	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Jumlah Produk Pangan yang Dikonsumsi Masyarakat Produk pangan Alternatif	14%	540.200.096	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan harga Pangan		Persentase Stock Pasokan dan Harga Pangan Sesuai Kebutuhan Kabupaten	83%	200.872.345	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan harga Pangan		Persentase Stock Pasokan dan Harga Pangan Sesuai Kebutuhan Kabupaten	83%	200.872.345	
	Penyediaan Informasi harga Pangan dan neraca Bahan Makanan	Disketapang	Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan makanan	2 Laporan	32.463.540	Penyediaan Informasi harga Pangan dan neraca Bahan Makanan	Disketapang	Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan makanan	2 Laporan	32.463.540	
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Disketapang	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	21.430.180	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Disketapang	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	21.430.180	



<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan pokok dan pangan lainnya</i>	<i>1 laporan</i>	<i>24.444.675</i>	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Lainnya</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan pokok dan pangan lainnya</i>	<i>1 laporan</i>	<i>24.444.675</i>	
<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>22.278.900</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>22.278.900</i>	
<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Yang Dikembangkan</i>	<i>10 unit</i>	<i>22.278.900</i>	<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Yang Dikembangkan</i>	<i>10 unit</i>	<i>22.278.900</i>	
<i>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan took tani Indonesia (TTI)</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan</i>	<i>20 kelompok</i>	<i>150.000.000</i>	<i>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan took tani Indonesia (TTI)</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan</i>	<i>20 kelompok</i>	<i>150.000.000</i>	



Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Disketapang</i>	Persentase Stok Cadangan Pangan	100%	148.521.869	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Disketapang</i>	Persentase Stok Cadangan Pangan	100%	148.521.869
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>21.422.100</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>21.422.100</i>
<i>Pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota</i>	<i>40 Ton</i>	<i>96.399.450</i>	<i>Pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota</i>	<i>40 Ton</i>	<i>96.399.450</i>
<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Cadangan pangan Pemerintah kabupaten /Kota yang terpelihara</i>	<i>40 Ton</i>	<i>31.700.319</i>	<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Cadangan pangan Pemerintah kabupaten /Kota yang terpelihara</i>	<i>40 Ton</i>	<i>31.700.319</i>



Penentuan harga Minimum daerah untuk pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi		Persentase komoditas Pangan local yang ditetapkan Harganya	100%	31.521.090	Penentuan harga Minimum daerah untuk pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi		Persentase komoditas Pangan local yang ditetapkan Harganya	100%	31.521.090	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pokok lokal</i>	<i>1 laporan</i>	31.521.090	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pokok lokal</i>	<i>1 laporan</i>	31.521.090	
Pelaksanaan Pencapaian targetKonsumsi pangan Perkpita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Glzi		Persentase Jumlah dokumen angka Ketersediaan Energi (Kilo Kalori perkapita/ Tahun)	88%	158.284.792	Pelaksanaan Pencapaian targetKonsumsi pangan Perkpita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Glzi		Persentase Jumlah dokumen angka Ketersediaan Energi (Kilo Kalori perkapita/ Tahun)	88%	158.284.792	
<i>Penyusunan dan Penetapan Target konsumsi Pangan perkapita/Tahun</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Target konsumsi Perkapita/ tahun</i>	<i>1 Dokumen</i>	36.060.535	<i>Penyusunan dan Penetapan Target konsumsi Pangan perkapita/Tahun</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Target konsumsi Perkapita/ tahun</i>	<i>1 Dokumen</i>	36.060.535	



			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis Sumber daya lokal</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>200.000.000</i>		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis Sumber daya lokal</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>200.000.000</i>	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya lokal</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya lokal</i>	<i>Disketapang</i>			
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita/Tahun</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25.757.525</i>		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita/Tahun</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25.757.525</i>	
	<i>Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita/Tahun</i>	<i>Disketapang</i>				<i>Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita/Tahun</i>	<i>Disketapang</i>			
<b>PROGRAM KERAWANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>JUMLAH DESA /KELURAHAN RAWAN PANGAN /JUMLAH DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>42%</b>	<b>113.333.110</b>	<b>PROGRAM KERAWANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>JUMLAH DESA /KELURAHAN RAWAN PANGAN /JUMLAH DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>42%</b>	<b>113.333.110</b>	



	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	36.060.535	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	36.060.535	
	<i>Penyusunan Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan</i>	<i>1 Dokumen</i>	36.060.535	<i>Penyusunan Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan Pangan</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan</i>	<i>1 Dokumen</i>	36.060.535	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan yang dilakukan	100%	77.272.575	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan yang dilakukan	100%	77.272.575	
	<i>Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten /Kota</i>	<i>1 laporan</i>	25.757.525	<i>Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten /Kota</i>	<i>1 laporan</i>	25.757.525	





			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	800.000.000		<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	800.000.000	
	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>								
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		SAMPEL PANGAN YANG AMAN/JUMLAH TOTAL SAMPEL PANGAN	83 %	131.127.240	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	SAMPEL PANGAN YANG AMAN/JUMLAH TOTAL SAMPEL PANGAN	83 %	131.127.240	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota		Persentase keamanan yang menjadi Target pengawasan dalam Setahun	100%	131.127.240	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan yang menjadi Target pengawasan dalam Setahun	100%	131.127.240	



	<i>Penguatan Kelembadgaan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Kelembagaan keamanan pangan segar Daerah kabupaten /Kota yang dibina</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>27.318.175</i>	<i>Penguatan Kelembadgaan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Kelembagaan keamanan pangan segar Daerah kabupaten /Kota yang dibina</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>27.318.175</i>	
	<i>Sertifikasi keamanan pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Sertifikasi Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>3 setifikasi</i>	<i>21.854.540</i>	<i>Sertifikasi keamanan pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah Sertifikasi Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>3 setifikasi</i>	<i>21.854.540</i>	
	<i>Registrasi keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan daerah kabupaten kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>16.390.905</i>	<i>Registrasi keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan daerah kabupaten kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>16.390.905</i>	



	<i>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>2</i> <i>Dokumen</i>	<i>27.318.175</i>	<i>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>2</i> <i>Dokumen</i>	<i>27.318.175</i>	
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>38.245.445</i>	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Disketapang</i>	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>38.245.445</i>	



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa - Gowa

---



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Uraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usul program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. lampirkan table T-C 32



**Tabel T-C.32**

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	2	3	4	5	6
1	Usulan Masyarakat dari Musrenbang Desa/Kel	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
2	Usulan Masyarakat Hibah	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
3	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
4	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan PD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas - prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- c. Rencana Strategis
- d. Rencana Kerja Pemerintah
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD.

Tujuan dan sasaran disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk memberikan gambaran arah pembangunan ketahanan pangan pada Tahun 2025 berdasarkan Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas



Ketahanan Pangan dijabarkan kedalam misi yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu dari tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Melaksanakan birokrasi pelayanan yang professional, bersih dan memiliki integritas kerja yang tinggi;
2. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan yang berkelanjutan.
3. Menyediakan infrastruktur pangan untuk peningkatan ketahanan pangan.
4. Meningkatkan cadangan pangan, sistem distribusi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga.
5. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal;
6. Meningkatkan mutu konsumsi yang berbasis Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
7. Mewujudkan diversifikasi pangan yang berbasis bahan baku pangan lokal.
8. Meningkatkan kewaspadaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.
9. Melaksanakan perencanaan pembangunan pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi

Di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah disebutkan bahwa sasaran utama pembangunan di bidang pangan yang ingin dicapai untuk 2025 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar .

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Badan Ketahanan Pangan Kementrian menetapkan tujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :





1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar. Dengan sasaran strategis :
  1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
  2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
  3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
  4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
  5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
  6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 di sebutkan bahwa sasaran Pembangunan di bidang pangan yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah Pembangunan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat ,peningkatan diversifikasi olahan pangan lokal, meningkatkan bahan pangan sumber karbohidrat non beras, pengembangan gerai/outlet, penjualan pangan berbahan baku lokal non beras dan non terigu di perkotaan dan pedesaan dengan penampilan yang modis, higienis, dan harga yang kompetitif namun tetap terjangkau masyarakat luas, Sosialisasi P2L/B2SA kepada seluruh lapisan pemerintah/swasta/lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial dll. MOU antara Dinas Ketahanan Pangan dengan instansi terkait tentang penanganan kerawanan pangan sebagai acuan penentuan program dan kegiatan penanganan kerentanan pangan di Kabupaten Gowa. Program kegiatan yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Dinas Ketahanan pangan kabupaten Gowa dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kerawanan pangan adalah: Program Penanganan Kerawanan Pangan.



### 3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Agenda Prioritas yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025. Berdasarkan rincian dari Tujuh Agenda Prioritas tersebut, maka Ketahanan Pangan tercakup dalam Agenda Prioritas yang pertama, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", melalui "pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan". Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian RI pada Tahun



2020 - 2024 merumuskan Visi “*Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*”, yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani;
- d. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Visi Badan Ketahanan Pangan adalah “*Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan*”. Misi Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
- c. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :
  - a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
  - b. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan.
  - c. Memperkuat sistem distribusi pangan.
  - d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal.
  - e. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.
- b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan.
- c. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- d. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman.
- e. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG).
- f. Tercapainya keamanan pangan segar.

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Kebijakan penyediaan pangan beragam berbasis sumberdaya lokal.



- b. Kebijakan pengurangan jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
- c. Kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan.
- d. Kebijakan pengelolaan cadangan pangan.
- e. Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- f. Pengawasan keamanan pangan segar.

RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang Strategi Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
- b. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan berimbang, bergizi, sehat dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
- d. Penanganan keamanan pangan segar;

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024. Bunyi Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong*”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dijabarkan dalam Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 yaitu :

- a. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
- b. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;



- c. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
- d. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024, pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menunjang Tujuan ke-1 pada Misi Pertama yang berbunyi “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Didukung Konektivitas Antar Wilayah”, dengan Sasaran “Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”. Pencapaian dimaksud dilakukan dengan Strategi dan Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026, yaitu **Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Masyarakat, serta Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT ), dengan Arah Kebijakan yang difokuskan pada Pengembangan Produk Olahan, Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat untuk Mengkonsumsi Aneka Ragam Pangan dengan Prinsip Gizi Seimbang, serta Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.**

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan**

Sasaran Renja Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 juga didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa terhadap ketahanan pangan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 antara lain: menekan wilayah rentan rawan pangan yang terindikasi sangat rawan pangan dan rawan pangan, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan beras pemerintah dan lumbung



pangan masyarakat, konsentrasi pada wilayah yang masyarakatnya terindikasi mengalami kurang gizi yang berdampak terjadinya stunting.

Sejalan dengan isu – isu strategis yang berkembang dan langkah – langkah kebijakan yang diambil pemerintah pusat, maka Dinas Ketahanan Pangan merumuskan tujuan sebagai berikut :

Dengan Indikator Tujuan : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah melalui peningkatan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memperkuat kemandirian pangan masyarakat, Sedangkan Sasaran Strategis meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat melalui penguatan distribusi pangan, dan pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal. yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dapat dirumuskan Indikator sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan utama (beras),
2. Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)

Ketersediaan Pangan Utama Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TABEL ....  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2022	2023	2024	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Tujuan :</b> meningkatkan Daya saing Ekonomi Berbasis sumber Daya Lokal dan sector unggulan Daerah melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan yang terjangkau dan Aman Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, sehingga dapat memperkokoh Kemandirian Pangan Masyarakat <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Produktivitas dan pertumbuhan Ekonomi dengan pengolahan Pangan untuk memperkokoh Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Utama (Beras)	Ton	174.886	175.886	176.886	251.701	143.92
2		Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	Ton	217.250	249.830	287.300	368.798	169.76
3		Mutu konsumsi pangan sesuai Pola Pangan harapan (PPH)	Skor	90.1	90.2	90.3	90.1	100



### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan**

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang operasional, perumusan program dan kegiatan menjadi bagian yang penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah merupakan jabaran lebih konkrit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 program dan 15 kegiatan dengan 30 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Penanganan Keamanan Pangan

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi Dan penyusunan laporan caoan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Monitoring evaluasi kinerja SKPD

##### **1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

##### **1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **1.4. Administrasi Umum perangkat daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan /Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

#### 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Oprasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Aset Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

#### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (surat keluar dan surat masuk)
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan  
Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

### 2.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur



- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

### **3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

#### 3.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan berbasis Sumberdaya local
- Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)

#### 3.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### 3.3 Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

#### 3.4 Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Family Farmin)
- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Per Kapita Per Tahun

### **4. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

#### 4.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

#### 4.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **5. Program Penanganan Keamanan Pangan**

### **5.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota**

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) daerah kabupaten/Kota

Program dan kegiatan pembangunan tahunan tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta perkiraan kebutuhan dana. Penjabaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

1. Berisi penjelasan mengenai Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya :

- pencapaian visi dan misi kepala daerah
- pencapaian SDGs
- pengentasan kemiskinan
- pencapaian NSPK dan SPM
- pendayaguna potensi ekonomi daerah
- pengembangan daerah terisolir
- dst

2) Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program / kegiatan

- a. Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka satabilitas pasokan dan harga pangan;
- b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota;
- c. Penyusunan Peta Kerentanaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- d. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota



yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan Program Peningkatan dan Ketahanan Pangan masyarakat sembilan tahun lebih diarahkan untuk memperbaiki akses penduduk terhadap rawan pangan, termasuk penduduk miskin dan penduduk di wilayah terpencil. Sasaran utama yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat melalui penguatan distribusi pangan, dan pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal. yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Program ini akan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs dan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 5 program, 15 kegiatan, dan dari 50 sub kegiatan yang tersedia, yang memiliki pagu indikatif adalah 30 sub kegiatan. Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2025, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, program dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan dan
5. Program Penanganan Keamanan Pangan.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Artinya Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang terdiri dari Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 5 program, 15 kegiatan, dan dari 50 sub kegiatan yang tersedia, yang memiliki pagu indikatif adalah 40 sub kegiatan. Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2024

Rencana Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2024, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, program dimaksud adalah: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 3. Program Peningkatan Divwesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan dan 5. Program Penanganan Keamanan Pangan. Kegiatan - kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dilihat tabel 4.1 di bawah:



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN GOWA**

**Dinas ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	8				
0 2					<i>berdasarkan rincian belanja</i>					
0 2	0 9									
2 9 1	0 0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota			100%	888.935.976
0 2 9 1	0 0 0 0	2.			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi kinerja			100%	78.045.301
					Terlaksananya Penyusunan Dokumen penganggaran dan Evaluasi kerja					
						872.407.372	DAU			
						77.272.575	DAU			



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0 9 . 0 0 2	2. 0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Disketapang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36.060.535	DAU	4 Dokumen	36.421.140
0 9 . 0 0 2	2. 0 1	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	25.757.525	DAU	1 Laporan	26.015.100
0 9 . 0 0 2	2. 0 1	07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja		Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	25.757.525	DAU	1 Laporan	26.015.100



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	0			Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Layanan Administrasi keuangan		Terlaksananya Layanan Administrasi keuangan	188.029.933	DAU		100 %	189.910.232
2	1	2	2									
0	0	2.	0	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	2.867.410.993	DAU		30 orang	2.867.410.993
2	1	2	1									
0	9	2.		Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	2.867.410.993	DAU		30 orang	
2	1	2	02									2.867.410.993
0	9	2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/VerifikasimKeuangan SKPD		Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan pengujian/VerifikasimKeuangan SKPD	154.545.150	DAU		1 Dokumen	156.090.602
2	1	2	03									





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0 2	0 1	2. 0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	25.757.525	DAU		1 Laporan	26.015.100
0 2	0 1	2. 0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan Administrasi kepegawaian	Terlaksana nya Ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	27.045.401	DAU		95%	27.315.855
0 2	0 1	2. 0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan nya	27.045.401	DAU		40 Paket	27.315.855



0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.181.136	DAU		89%	349.642.947
2	1	6									
0	9	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.454.515	DAU		20 Paket	15.609.060
2	1	6	01								
0	9	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25.757.525	DAU		30 Paket	26.015.100
2	1	6	02								
0	9	0		Penyediaan barang Cetak dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Tersedianya Paket barang cetak dan Pengandaan	7.650.750	DAU		2 Paket	7.727.258
2	1	6	05								



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0 9 . 2. 0 0 0 2 1 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Tersedianya Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	3.606.054	DAU	2 Dokumen	3.642.114
0 9 . 2. 0 0 0 2 1 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	7.727.258	DAU	120 Laporan	7.804.530
0 9 . 2. 0 0 0 2 1 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.575.250	DAU	450 Laporan	260.151.003
0 9 . 2. 0 0 0 2 1 7		Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik Daerah	133.939.130	DAU	89 %	135.278.521

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA****DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.								2 Unit	109.263.421
0	0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang disediakan		Tersedianya kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	108.181.605	DAU			
2	1	7	02									
0	9	.	2.								5 Unit	26.015.100
0	0	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan		Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	25.757.525	DAU			
2	1	7	06									
0	9	.	2.								15 Unit	30.357.525
0	0	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan/ sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia		Tersedianya Peralatan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	30.015.100	DAU			
2	1	7	10									
0	9	.	2.								90 %	46.306.878
0	0	0		Penyediaan jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Terlaksananya Ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	38.121.137	DAU			
2	1	8										



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0 9 . 0 0 2	2. 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	12.363.612	DAU	750 Laporan	12.487.248
0 9 . 0 0 2	2. 0 8	02	Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	10.201.000	DAU	3 Laporan	10.303.000
0 9 . 0 0 2	2. 0 8	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya laporan penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	15.454.515	DAU	15 laporan	15.609.060
0 9 . 0 0 2	2. 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	7.727.258	DAU	15 laporan	7.804.530



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.							90 %	62.436.241
0	0	0		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemelihara an barang Milik Daerah		Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.818,060	DAU		
2	1	9		<i>Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>		<i>Tersedianya Jasa pemeliharaa n , biaya Pemelihara an, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	7.500.000	DAU	2 Unit	7.500.000



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

											3 unit	12.500.000
0	9	2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan	12.500.000	DAU				
0	9	2.		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya peralatan dan Mesin Lainnya	10.303.010				5 Unit	
0	9	2.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Terpeliharanya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	36.060.535	DAU			9 Unit	36.421.140



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	608.242.963	DAU		82 %	626.490.252
0	0	2		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur yang Direalisasikan		Terlaksana Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	608.242.963	DAU		85%	626.490.252
0	0	2	2	01	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Lumbung	289.590.811	DAU		4 unit	298.278.535





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0 9 . 0 2	2. 0 2	1	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Teresdia	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	63.358.715	DAU	4 Unit	65.259.476
0 9 . 0 2	2. 0 2	1	03	Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastrukt r Pendukung Kemandiria n Pangan yang Tersedia	Tersedianya infrastrukt r Pendukung Kemandiria n Pangan Lainnya	196.690.860	DAU	4 Unit	202.591.586
0 9 . 0 2	2. 0 2	1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastuktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastuktur Logistik	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastuktur Logistik	58.602.577	DAU	1 Laporan	60.360.655



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Produk Pangan yang Dikomsumsi Masyarakat :Produk Pangan Alternatif		MENINGKATNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	540.200.096	DAU		14 %	550.022.425
0	9			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stok Pasokan dan Harga Pangan sesuai Kebutuhan Kabupaten		Tersedianya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.872.345	DAU	85%	206.898.515	
2	3	0	2.									



											<i>2 Laporan</i>	<i>33.437.446</i>
<i>0</i>	<i>9</i>	<i>2.</i>	<i>01</i>	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>	<i>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>		<i>32.463.540</i>	<i>DAU</i>				
<i>0</i>	<i>9</i>	<i>2.</i>	<i>02</i>	<i>Penyediaan pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Pangan berbasis Sumber daya Lokal yang tersedia</i>		<i>21.430.180</i>				<i>1 laporan</i>	<i>22.073.085</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.								1 Laporan	25.178.015
0	0	0	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	24.444.675	DAU				
0	9	.	2.								3 Dokumen	22.947.267
0	0	0	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22.278.900	DAU				
0	9	.	2.								10 Unit	22.947.267
0	0	0	04	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersedianya Jumlah Unit Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	22.278.900	DAU				



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

2	0	2.	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Tersedianya Jumlah Kelompok Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	150.000.000			20 Klp	150.000.000
2	0	2.		Pengelolaan dan Kelembagaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Stok Cadangan Pangan	Terlaksananya Pengelolaan dan Kelembagaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	149.521.869	DAU		100%	151.419.969
2	0	2.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	21.422.100	DAU		3 Laporan	21.636.321



0	9	2.		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	96.399.450	DAU		50 Ton	97.363.445
0	0	0	03									
0	9	2.		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Terpelihara nya Cdangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	31.700.319	DAU		50 Ton	32.420.203
0	0	0	04									
0	9	2.		Penentuan harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi	Persentase Komoditas Pangan Lokal yang Ditetapkan Harganya		Terlaksana nya Penentuan harha Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi	31.521.090	DAU		100 %	31.386.301
0	0	0	03									



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.								1 Laporan	31.836.301
0	0	0	0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pangan Lokal	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok lokal	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga Minimum Pangan Pangan Lokal	31.521.090	DAU			
0	9	.	0	2.	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Persentase Jumlah Dokumen Angka Ketersediaan Energi (Kilo Kalori Perkapita/Tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	158.284.792	DAU	90%		159867.640
0	9	.	0	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	36.060.535	DAU	1 Dokumen		36.758.352



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Pumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis sumber Daya Lokal		Tersedianya Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Pumber Daya Lokal	200.000.000	DAU	2 Laporan	200.000.000
0	9	.	2.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita/Tahun	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita/Tahun		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita/Tahun	25.757.525	DAU	1 Laporan	26.015.100
0	9	.	2.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN PANGAN/JUMLAH DESA DAN KELURAHAN		MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113.333.110	DAU	40 %	114.466.441
0	2	3	4	02								
0	2	3	4	03								





0 9 . 0 2	2. 0 0 1			Penyusunan Peta Kerentanan Pangan Kecamatan	Penanganan Penanganan Kerawanan Pangan		Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan Pangan Kecamatan	36.060.535	DAU		100%	36.421.140
0 9 . 0 2	2. 0 0 1	01		Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Tersedianya Dokumen Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Kerentanan Pangan	36.060.535	DAU		1 Dokumen	36.421.140
0 9 . 0 2	2. 0 0 2			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan yang Dilakukan		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.272.575	DAU		100%	78.045.301

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA****DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	9	.	2.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan PanganKabupaten/kota	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	25.757.525	DAU	1 Laporan	26.015.100
0	9	.	2.	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan a Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	800.000.000	DAU	1 Dokumen	900.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Andi Mallombasang NO. 46 sungguminasa

0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	SAMPEL PANGAN YANG AMAN/JUM LAH TOTAL SAMPEL PANGAN		MENINGKA TNYA PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN	131.127.240	DAU		83 %	135.061.057
0	0	2.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang Menjadi target Pengawasa n Dalam Setahun		Terlaksana nya Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	131.127.240	DAU		100%	135.061.057
0	0	2.	01	Penguatan Kelembangaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembanga an Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang dibina		Tersedianya Dokumen Penguatan Kelembanga an Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	27.318.175	DAU		2 Dokumen	28.137.720



0	9	.	2.									
0	0	0										
2	5	1	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	21.854.540	DAU	3 Sertifikasi	22.510.176	
0	9	.	2.									
0	0	0										
2	5	1	03	Registrasi keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya Dokumen Registrasi keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	16.390.905	DAU	5 Dokumen	16.882.632	
0	9	.	2.									
0	0	0										
2	5	1	04	Rekomendasi keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendas i keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya Dokumen Rekomendas i keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	27.318.175	DAU	2 Dokumen	28.137.720	



					<i>Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tersedianya Dokumen Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
0	9	.	2.									
0	0	0		<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>			38.245.445	DAU		1 Dokumen	39.392.808	
2	5	1	05									











## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang akan tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, setiap unit terkait ( Sekretariat dan Bidang ) wajib menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi maupun pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik antar program, antara kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing unit kerja. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kabupaten. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program - program yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya. RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas untuk menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik, dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan
3. Rencana tindak lanjut



Pada akhir tahun 2024, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam notakesepakatan KUA dan PPAS, RKA SKPD, peraturan perundang-undangan yang mengatur lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sungguminasa, Januari 2023

**Kepala Dinas**



**H. Syamhari Rasyid, S.Ag, M.H**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19770917 200312 2 001



## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi Dan penyusunan laporan caoan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Monitoring evaluasi kinerja SKPD

### **1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

### **1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **1.4. Administrasi Umum perangkat daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan /Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### **1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Oprasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Aset Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

#### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (surat keluar dan surat masuk)
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

#### 2.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesusai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
  - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

### **3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

- #### 3.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan



- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan berbasis Sumberdaya local
- Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)

### 3.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.4 Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

### 3.4 Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Family Farmin)
- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Per Kapita Per Tahun

## **4. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

### 4.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Masyarakat



- Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

#### 4.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **5. Program Penanganan Keamanan Pangan**

#### 5.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) daerah Kabupaten Kota